

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM MASA PACARAN
(Studi Kasus di SPEK-HAM)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun oleh:

RP DONNY ADITYA PUTRA
NIM: C 100 110 181

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM MASA PACARAN
(Studi Kasus di SPEK-HAM)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RP.DONNY ADITYA PUTRA
NIM: C 100 110 181

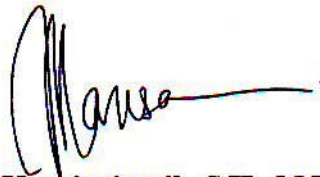
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



Kuswardani, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM MASA PACARAN
(Studi Kasus di SPEK-HAM)**

Yang ditulis oleh:

RP DONNY ADITYA PUTRA
NIM: C 100 110 181

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

Ketua : Kuswardani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota : Hartanto, S.H., M.Hum.

()
()
()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 Agustus 2016

Penulis



RP DONNY ADITYA PUTRA
C100110181

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM MASA PACARAN
(Studi Kasus DI SPEK-HAM)**

RP Donny Aditya Putra
C100110181
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
donnyadityaputra@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam masa pacaran dari sisi normatif dan dari sisi fakta yang ada dan mengetahui hambatan apa sajakah yang ditemui terhadap korban kekerasan dalam masa pacaran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilaksanakan di Kantor SPEK-HAM Kartasura Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan dalam pacaran pada kasus Nomor 005/I/PK/UKPK/SPEK-HAM/I/2013 dimana korban masih berusia 16 tahun dan mengalami kekerasan seksual sehingga hamil dan memilih jalur non litigasi dengan melakukan konsultasi psikologis kepada SPEK-HAM. Hambatan dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran antara lain: keluarga korban menutup diri dan lebih memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, kebingungan keluarga korban dalam melakukan proses pengaduan, aparat penegak hukum yang tidak melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan, serta pada undang-undang Pasal Pencabulan (289-296 KUHP) bahwa dalam mengadvokasi kasus pelecehan seksual adalah KUHP belum mengatur secara tegas perlindungan terhadap korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: perlindungan hukum, kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the forms of legal protection for women victims of crimes of violence in the courtship of the normative side and from the facts and know what are the obstacles encountered on the victims of violence in courtship. This research includes empirical juridical. The results showed that the forms of legal protection against dating violence in case No. 005 / I / PK / UKPK / Spek-HAM / I / 2013 where the victim was 16 years old and suffered sexual violence so that pregnant and choose the path of non-litigation, through consultation psychological. Obstacles encountered in the protection of women victims of violence in courtship among others: the victim's family shut down and prefer to settle the case amicably, confusion families of victims in the process of complaints, law enforcement officials not commit against the perpetrators of violence against women, as well as on legislation Article molestation (289-296 Criminal Code) that in advocating the sexual abuse cases is the Penal Code has not been set explicitly the protection of victims of sexual abuse.

Keywords: legal protection, dating violence, sexual assault

PENDAHULUAN

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.¹

Tiap manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Seringkali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai.

Akan tetapi acapkali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya. Apabila ketidakseimbangan perhubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan maka akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia/anggota masyarakat itu harus

¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 1.

memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana ia hidup.²

Mengenai pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum dan kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.

Pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seseorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.³ Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴

Kekerasan Dalam Pacaran atau yang sering disebut dengan KDP dilakukan oleh banyak kalangan yaitu kalangan dewasa dan kalangan anak, pada tahun 2013 saja di SPEK-HAM terdapat 2 (dua) kasus yang dilakukan oleh orang dewasa dan

² C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, hal.33-34.

³ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT.Eresco Jakarta, hal. 50.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah, hal.2.

terdapat 2 (dua) kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sedangkan pada tahun 2014 pada Studi Kasus di SPEK-HAM terdapat 1 (satu) kasus yang dilakukan oleh kalangan dewasa dan 1 (satu) yang dilakukan oleh kalangan pelajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan yang dilakukan dalam masa pacaran yaitu antara lain adanya faktor intern dan ekstern yaitu antara lain faktor intern meliputi: tidak terpenuhinya hasrat batiniah dari si pelaku terhadap korban yang berakibat rusaknya fisik korban, adanya faktor kecemburuan terhadap pelaku dan korban, dan lain-lain dan faktor ekstern yaitu meliputi: terdapatnya hubungan antara si korban dengan orang lain yang berakibat kecemburuan, dan lain-lain. Di sini penulis menitikberatkan pada kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) yang dilakukan oleh pelajar.

Banyak yang beranggapan bahwa dalam berpacaran tidak mungkin terjadi kekerasan, karena pada umumnya masa berpacaran adalah masa yang penuh keindahan yang setiap hari diwarnai oleh tingkah laku dan kata-kata yang manis. Hal tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ketidaktahuan akibat kurangnya informasi dan data dari laporan korban tentang kekerasan ini.⁵

Upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diwujudkan melalui Lembaga Negara yaitu KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Ditegaskan pula di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 3 yang berbunyi *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan*

⁵KESMAS, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 3, No. 4 Februari 2009 <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=269604&val=7113&title=Kekerasan%20dalam%20Pacaran%20pada%20Siswi%20SMA%20di%20Jakarta> diunduh 18 Oktober 2015 12:58 WIB

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Informasi yang benar dan cukup tentang kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan akan membuat remaja mengerti dan memahami tentang praktik kekerasan yang mereka alami, mereka cenderung terhindar dari bentuk-bentuk perlakuan kekerasan baik itu secara fisik, maupun non fisik. Informasi ini dapat didapatkan dari orang tua, guru, teman, dan media masa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam masa pacaran dari sisi normatif dan dari sisi fakta yang ada dan untuk mengetahui hambatan yang ditemui terhadap korban kekerasan dalam masa pacaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris yaitu penelitian hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka penelitian hukum ini tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali apabila penelitiannya itu bersifat eksplanatoris.⁶ Sumber data menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal.53.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Masa Pacaran Didalam Peraturan-Undangn maupun dalam Fakta yang Terjadi

Potret Kasus: Nomor 005/I/PK/UKPK/SPEK-HAM/I/2013

Dalam penelitian ini difokuskan pada kekerasan dalam masa pacaran yang terdapat di SPEK-HAM. SPEK-HAM Solo merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pertama kali dengan bentuk yayasan pada tanggal 20 November 1998 dan bertempat di kota Solo, berdasarkan hasil Musyawarah Anggota SPEK-HAM pada 28 April – 1 Mei 2006, SPEK-HAM berubah menjadi perhimpunan. SPEK-HAM Solo ikut menangani kasus-kasus yang menimpa kaum perempuan dan ikut bagian dalam usaha lembaga swadaya masyarakat perempuan Indonesia lainnya dalam memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kaum perempuan yang membutuhkan. SPEK-HAM Solo memiliki visi menjadi organisasi pelopor gerakan perempuan dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat miskin, khususnya perempuan. Kebutuhan dasar tersebut termasuk juga perlindungan yang diberikan kepada kaum perempuan dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan baik dalam segi lahir, batin, dan hukumnya sehingga SPEK-HAM Solo menjadi tempat yang tepat untuk melakukan penelitian mengenai strategi apa yang digunakan oleh SPEK-HAM Solo dalam menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan bisa ditekan seminimalisir mungkin.

Kekerasan dalam pacaran pada sekarang ini terjadi setelah adanya seksual yang disertai dengan janji-janji atau bujukan, setelah itu korban yang rata-rata ditinggalkan. Pada kasus yang sampai menyebabkan kehamilan banyak terjadi

pada perempuan yang ditinggalkan pasangannya begitu saja atau justru dipaksa untuk melakukan aborsi. Dalam masa pacaran tak jarang juga terjadi pola hubungan seksual dengan paksaan dengan ancaman kekerasan fisik.

Adapun akibat-akibat yang diderita korban kekerasan dalam pacaran (KDP) sangat beragam dan bertingkat-tingkat. Seperti (1) bagi perempuan, adanya trauma terhadap laki-laki, (2) takut membuat relasi baru dengan laki-laki dan (3) perempuan merasa tidak berharga karena kehilangan virginitasnya, begitujuga sebaliknya. KDP juga sering mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki, selain berdampak pada negatif perempuannya, perbuatan tersebut juga berdampak pada bayi yang akan dilahirkan.⁷

Selanjutnya, dalam aturan hukum di Indonesia, belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang kekerasan dalam masa pacaran, sehingga seringkali korban yang biasanya perempuan tidak terlindungi. Hal lain yang menyebabkan kekerasan ini tidak tercover adalah karena tidak adanya keberanian korban untuk melakukan pengaduan. Kekurangan bukti-bukti formal yang disyaratkan hukum dan pandangan aparat penegak hukum yang hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat legal formal sempit. Kekerasan dalam hukum lebih dipahami secara fisik dengan penegertian yang sangat terbatas. Untuk itu, perlindungan terhadap korban dapat digunakan ketentuan hukum yang berlaku secara umum baik dalam KUH Pidana maupun KUH Perdata.

Korban bernama T yang masih berusia 16 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP kelas 3. Korban telah menjalin hubungan dengan pacarnya

⁷Artikel Nurani Perempuan, *Kekerasan dalam Pacaran: Laporkan!.* <http://wccnuraniperempuan.blogspot.co.id/2013/04/kekerasan-dalam-pacaran-laporkan> diakses 16 Juli 2016.

yang juga seorang pelajar kelas 3 SMA. Keduanya sama-sama belum menikah dan telah menjalin hubungan sebagai pacar selama 1 bulan. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam masa pacaran adalah setelah satu bulan pacaran korban diajak bermain ke Tawangmangu dan disetubuhi pelaku, kejadian tersebut berlangsung sebanyak 2 kali hingga korban hamil.

Kasus Nomor 005/I/PK/UKPK/SPEK-HAM/I/2013 itu menunjukkan bahwa korban T masih berusia 16 tahun sehingga dinyatakan korban masih anak-anak atau belum dinyatakan cukup umur. Hal ini mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal I butir I UU No. 23/2002 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Korban juga mengalami kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sehingga korban hamil.

Berdasarkan pada kasus tersebut maka perlu upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada masa pacaran, terlebih dalam kasus tersebut korbannya adalah anak di bawah umur melalui Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 294 (1) yang berbunyi: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraannya), anak di bawah pengawasannya, semua di bawah umur, orang yang di bawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya atau dijaganya atau bujangnya atau orang di bawahnya, keduanya yang masih di bawah umur,

dipidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya Pasal 76D dan 76EUU 35/2014 yaitu Pasal 76D UU 35/2014: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dan Pasal 76E UU 35/2014: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Juga terdapat dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi " Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 69 yang berbunyi "Perlindungan Khusus bagi Anak Korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I dilakukan melalui upaya: (a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak Korban tindak Kekerasan; dan (b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Berdasarkan dua undang-undang tersebut pada dasarnya bahwa kekerasan dalam masa pacaran dapat dikenai sanksi pidana selama pihak korban memperkarakan perbuatan tersebut, terlebih apabila korban masih di bawah umur atau kurang dari 18 tahun., hanya saja faktanya hal tersebut jarang dilakukan, hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan SPEK-HAM menyatakan bahwa

pada kasus T tersebut orang tua korban juga tidak melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib dan memilih mendatangi SPEK-HAM untuk melakukan konsultasi psikologis. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kasus kekerasan dalam masa pacaran faktanya tidak diproses secara hukum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari kasus tersebut memilih untuk menggunakan layanan konseling.⁸ Upaya non litigasi seperti konseling memang juga harus dilakukan agar supaya terjadi perubahan persepsi yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan perubahan kebijakan dalam melihat kasus *dating violence* khususnya dalam memberikan rasa nyaman dan aman bagi korban kekerasan dalam masa pacaran. Berangkat dari itu, upaya-upaya non litigasi seperti pendidikan, penyadaran dan pemberdayaan juga harus dilakukan agar supaya terjadi perubahan persepsi yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan perubahan kebijakan dalam melihat kasus *dating violence*.

Hambatan yang Ditemui dalam Melindungi Perempuan terhadap Korban Kekerasan dalam Masa Pacaran

Fenomena kekerasan terhadap perempuan sama sekali bukan merupakan masalah kelainan individual, akan tetapi merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang membentuk ketimpangan relasi yang kemudian tercipta pembagian kekuasaan yang lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kenyataan ini kemudian menciptakan sebuah kondisi sosial yaitu, penggunaan kekuasaan yang berlebihan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak yang lebih lemah.

⁸ Nila Ayu, Koordinator Unit Penanganan SPEK-HAM Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 21 Juli 2016, pukul 10.30.

Kekerasan dalam pacaran masih belum begitu mendapat sorotan jika dibandingkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga terkadang masih terabaikan oleh korban dan pelakunya. Pengertian dari kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan yang mencakupi kekerasan fisik, psikologi dan ekonomi. Pelaku yang melakukan kekerasan ini meliputi semua kekerasan yang dilakukan di luar hubungan pernikahan yang sah yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 mencakup kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, mantan pacar, dan pasangan (pacar).

Kekerasan dalam pacaran menimbulkan dampak baik fisik maupun psikis. Dampak fisik bisa berupa memar, patah tulang, dan sebagainya. Sedangkan luka psikis bisa berupa sakit hati, harga diri yang terluka, terhina, dan sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, korban kekerasan dalam pacaran akan menganggap perlakuan yang diterima sebagai sesuatu hal yang wajar, padahal, hal tersebut bisa menghambat perkembangan korban kekerasan dalam pacaran. Dampak-dampak yang bisa ditimbulkan antara lain: depresi, menyalahkan diri sendiri, ketakutan merasa dibayangi oleh teror, rasa malu, merasa sedih, bingung, mencoba bunuh diri, cemas, tidak mempercayai diri sendiri dan orang lain, merasa bersalah.

Korban kekerasan dalam masa pacaran perlu penanganan yang serius. Penanganan dari Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) ini tentunya bergantung pada penyebabnya. Proses penanganan KDP ini perlu melibatkan penyadaran kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, karena biasanya dalam kasus-kasus

KDP diakibatkan ketergantungan pada masing-masing pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kasus kekerasan dalam masa pacaran faktanya tidak diproses secara hukum. Hasil wawancara Deputy Penanganan Kasus SPEK-HAM menunjukkan bahwa beberapa hambatan dalam melindungi korban kekerasan dalam masa pacaran antara lain: (1) Keluarga korban menutup diri dan lebih baik menyelesaikan kasus tersebut sendiri karena merupakan aib keluarga serta kuatnya keyakinan masyarakat bahwa penyelesaian terbaik atas kekerasan seksual (yang mengakibatkan kehamilan atau tidak) adalah menikahkan pelaku dengan korban; (2) Kebingungan korban dan keluarga seringkali menjadi penyebab korban tidak bersedia memproses kasusnya karena birokrasi dalam pelaporan kekerasan dalam masa pacaran, di mana korban yang melapor seringkali harus bolak-balik sampai 3 kali, untuk melengkapi administrasi pengaduan. Perubahan mekanisme pengaduan di Kepolisian di mana masyarakat/korban yang akan membuat laporan harus membuat surat pernyataan yang berisi kasus yang dilaporkan dan kronologinya tidak pernah diinformasikan ke masyarakat, hal ini juga membuat korban merasa enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya; (3) Aparat Penegak Hukum tidak melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan, padahal pasal yang dikenakan memenuhi syarat untuk dilakukannya penahanan terhadap pelaku. Pelaku yang tidak ditahan dapat menghilangkan barang bukti, mempengaruhi korban/ keluarga korban bahkan melarikan diri. Kondisi demikian makin memperburuk kondisi psikologi korban, korban menjadi frustrasi dan tidak percaya lagi pada proses hukum yang ada; (4) Hambatan lainnya adalah pada

Pasal Pencabulan (289-296 KUHP) bahwa dalam mengadvokasi kasus pelecehan seksual adalah KUHP belum mengatur secara tegas perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, yang mayoritas kaum perempuan. Dalam KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Segala perbuatan yang telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul, seperti cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan dalam pacaran sesuai dengan kasus Nomor 005/I/PK/UKPK/SPEK-HAM/I/2013 itu dapat disimpulkan bahwa korban T masih berusia 16 tahun sehingga dinyatakan korban masih anak-anak atau belum dinyatakan cukup umur. Hal ini mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal I butir I UU No. 23/2002 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Korban juga mengalami kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sehingga korban hamil, walaupun pada akhirnya keluarga korban memilih untuk melakukan konsultasi psikologis kepada SPEK-HAM, sehingga jalur non litigasilah yang diinginkan oleh keluarga korban dan tidak meneruskan ke jalur hukum.

Kedua, hambatan yang ditemui dalam melindungi perempuan terhadap korban kekerasan dalam masa pacaran antara lain adalah keluarga korban menutup diri dan lebih baik menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan, kebingungan korban dan keluarga dalam melakukan proses pengaduan, aparat penegak hukum yang terkadang tidak melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan, serta pada undang-undang khususnya tentang Pasal Pencabulan (289-296 KUHP) bahwa dalam mengadvokasi kasus pelecehan seksual adalah KUHP belum mengatur secara tegas perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, yang mayoritas kaum perempuan.

Saran

Pertama, kepada orang tua, perlu melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak, khususnya yang masih remaja, karena usia remaja masih rentan terhadap hal-hal yang bersifat menyimpang tentunya memerlukan bimbingan dari orang tua. Seiring waktu trend pacaran di kalangan remaja cenderung lebih bebas dalam mengekspresikan perasaan mereka, maka nasehat nasehat orang tua perlu terus dilakukan untuk menghindari terjadinya seks bebas.

Kedua, bagi remaja, hendaknya lebih mendahulukan kepentingan sekolahnya daripada harus berpacaran, serta membatasi pergaulan dengan lawan jenis untuk menghindari terjerumus ke dalam perilaku pacaran yang menyimpang.

Ketiga, bagi Kepolisian, hendaknya menindak tegas pelaku tindak pidana kekerasan dalam pacaran untuk memberikan efek jera, terlebih bila korban masih di bawah umur.

Keempat, bagi pemerintah, perlunya revisi undang-undang yang mengatur tentang hubungan seksual di luar nikah baik bagi yang sudah mempunyai suami atau istri ataupun yang masih *single*, hal ini bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam masa pacaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Muladi dan Nawawi, Barda. 1984. *Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Prasetyo, Teguh. 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Kasus Nomor 005/I/PK/UKPK/SPEK-HAM/I/2013

Internet

KESMAS, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 3, No. 4 Februari 2009
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=269604&val=7113&title=Kekerasan%20dalam%20Pacaran%20pada%20Siswi%20SMA%20di%20Jakarta> diunduh 18 Oktober 2015 12:58 WIB

Artikel Nurani Perempuan, *Kekerasan dalam Pacaran: Laporkan!*.
<http://wccnuraniperempuan.blogspot.co.id/2013/04/kekerasan-dalam-pacaran-laporkan> diakses 16 Juli 2016.